

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### **A. Gambaran Desa Pondok Labu**

Berdirinya Desa Pondok Labu, pada awal mulanya dari masyarakat Desa Binturung yang aktivitas sehari-harinya terbiasa berburu, memancing, dan mencari tumbuh-tumbuhan rotan dan garu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, banyaknya masyarakat berpindah tempat dan tidak menetap di Bintrung sehingga terbentuk suatu kelompok yang mungkin dibentuk menjadi sebuah desa. Pada tahun 1921 terjadi pemekaran dari Desa Binturung yang pada awalnya dinamakan Lati Tembok yang dipimpin oleh Kepala Kampung bernama Utow. Pada tahun 1944 Utow digantikan oleh Ipen sebagai Kepala Kampung sampai tahun 1957. Pergantian Kepala Kampung yang masa itu dipimpin oleh Ipen digantikan oleh Nebe yang sudah menggunakan sistem pemerintahan Kepala Desa dan dibantu oleh seorang juru tulis yang bernama Nyilap sampai tahun 1971. Kepala Desa Nebe kemudian digantikan oleh Wakih tahun 1972 sampai dengan 1975.

Nama pembakal yang saat ini berubah sebutan menjadi kepala Desa Pondok Labu, pada tahun 1976-2009 dipimpin oleh Winsum.G dengan wakil bernama Nile dan dibantu seorang sekretaris desa pada tahun 1985-2009 bernama Wakar. Pada tahun 2010 sampai sekarang Desa Pondok Labu dipimpin oleh

Radiman dengan sekretaris desa yang menjabat selama dua periode dari tahun 2010-2022.

Tabel 1.1  
Daftar nama kepala Desa sejak berdirinya Desa Pondok Labu

No	Nama	Periode
1	Nebe	1958-1971
2	Wakih	1972-1975
3	Winsum. G	1976-2009
4	Radiman	2010-2022

Sumber: RPJM Desa Pondok Labu

## B. Kondisi Desa

### 1. Geografi

Desa Pondok Labu memiliki jarak tempuh sekitar 300 Kilo Meter (KM) dari Ibukota Kabupaten Kotabaru dan 25 KM dari Ibukota Kecamatan Pamukan Selatan. Berdasarkan peta dan luas Wilayah Desa Pondok Labu  $\pm 5.904 \text{ Km}^2$  yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:



### Gambar 1.1 Peta Desa Pondo Labu

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Keladen dan Random Kecamatan Tanjung Harapan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Senipah Kecamatan Tanjung Harapan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan dan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rampa Cengal dan Binturung Kecamatan Pamukan Selatan.

## 2. Iklim

Keadaan iklim yang ada di Desa Pondok Labu terdiri dari 3 (Tiga) musim yaitu musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan terjadi antara bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni. Permasalahan yang sering timbul biasanya pada musim panas yang mana suhu tinggi khususnya pada musim kemarau berdampak negatif untuk masyarakat yang berimbas kekeringan pada sungai dan kolam penampung air yang sudah disediakan, kekeringan tanaman bahkan tidak luput dari kebakaran lahan masyarakat. Pada musim hujan dan pancaroba biasanya permasalahan yang timbul akses sebagian jalan desa rusak dan berlumpur selain itu dampak negatif dari curah hujan yang tinggi dapat berimbas pada kesehatan masyarakat seperti diare, rematik dan penyakit-penyakit lainnya.

### 3. Tingkat Pendidikan

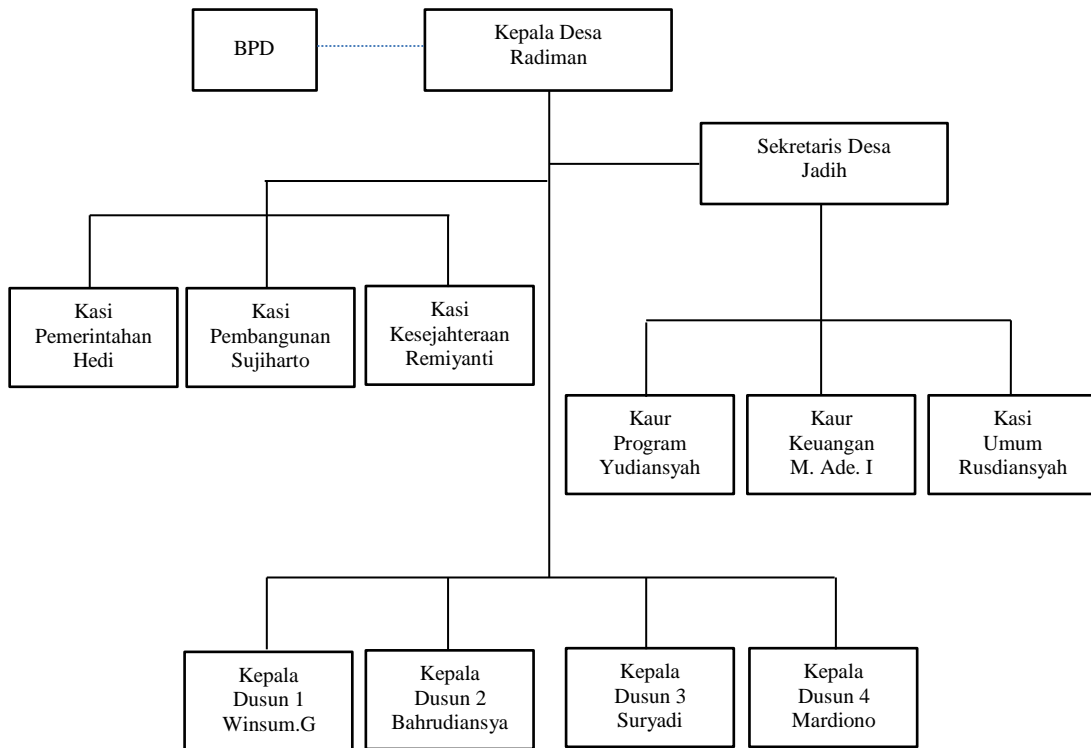
Jumlah penduduk di Desa Pondok Labu berdasarkan data yang ada dalam tingkat perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 2.057 jiwa. Sedang tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa tergolong sangat rendah. Tingkat pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 (Empat) bagian yaitu SD, SMP, SMA dan Sarjan serta dapat juga masyarakat yang tidak bersekolah. Berdasarkan data yang termuat di dalam Dokumen RPJM Des 2016-2022 jumlah dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 567 orang, SMP sebanyak 268 orang, SMA sebanyak 187 orang sedangkan tingkat perguruan tinggi sebanyak 5 orang.

### 4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Pondok Labu mayoritas berkebun dan sebagian petani. Masyarakat yang tidak berkebun dan bertani bekerja di Perusahaan Swasta yaitu PT. Minamas yang bergerak dibidang perkebunan Sawit.

## 2. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Pondok Labu

Gambar 1.2  
Struktur Pemerintahan Desa Pondok Labu



Bagian struktur kelembagaan pemerintahan desa di atas memiliki fungsi dan tugas/wewenang masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik

desa yang dipisahkan dari milik pribadi. Adapun tugas/kewenangan kepala desa:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- 2) Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa menjabat selama 6 (Enam) tahun dalam 1 (Satu) periode terhitung setelah pelantikan dan dapat menjabat paling lama 2 (Dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh aparatur desa lainnya yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa yang memiliki tugas sebagai koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes.

- 3) Mengendalikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDes.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

c. Kaur Program

- 1) Penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan program.
- 2) Penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan strategi.

d. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan memersiapan bahan penyusunan APDesa. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara desa adalah:

- 1) Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengeolaan administasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
- 3) Persiapan bahan penyusunan APBDesa.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

e. Kaur Umum

- 1) Melakukan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan urusan perlengkapan dan investais desa.
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga.
- 4) Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara.
- 5) Melakukan urusan surat menyurat,kearsipan dan ekspedisi.
- 6) Mengumpulkan,mengolah dan mengevakuasi data dibidang kesejahteraan rakyat.
- 7) Melakukan bimbingan dibidang agama,kesehatan,Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat.
- 8) Melakukan pelayanan kepada asyarakat dibidang kesejahteraan rakyat.
- 9) Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban banjir.
- 10) Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK),Karang Taruna,Pramuka dan organisasi kemasyarakatanlainnya.
- 11) Membina kegiatan pengumpulan zakat,infak,dan shadaqah (ZIS).
- 12) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat..
- 13) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan,administrasi



pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan.
- 2) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- 3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan.
- 4) Membantu tugas-tugas dibidang pungutan pajak, distribusi dan pendapatan lain-lain.
- 5) Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.
- 7) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.
- 8) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban.
- 9) Melakukan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 10) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban.
- 11) Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertanahan sipil perlindungan masyarakat.

- 12) Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana lainnya.
- 13) Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- 14) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kasi Pembangunan

- 1) Mengumpul, mengolah dan mengevaluasi data bidang perekonomian dan pembangunan.
- 2) Melakukan bimbingan dibidang perkoprasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- 3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa.
- 6) Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.

- 7) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- 8) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

h. Kasi Kesejahteraan

- 1) Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- 2) Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan.
- 3) Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu dan pendidikan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang disabilitas, yatim piatu, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bebas narapidana.
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat (ras in,BLSM,DSB)
- 6) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana.
- 7) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, dan dana sosial lainnya.
- 8) Membantu administrasi dibidang nikah, talaq, cerai,rujuk,dan kelahiran serta pengurusan jenazah.

i. Kepala Dusun

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah pada masyarakat.
- 4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW(rukun wilayah) dan RT(Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya.

**3. Visi dan Misi Desa Pondok Labu**

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai merupakan gambaran kesuksesan dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun kedepan yang disusun berdasarkan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Kotabaru, subansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMD), dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Pondok Labu, serta penyesuaian dengan visi dan misi Kepala Desa yang terpilih. Visi pembangunan Desa Pondok Labu untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun pertama RPJMDes periode 2016-2022 adalah:

a. Visi Pembangunan Desa

“Terwujudnya masyarakat Desa Pondok Labu yang agamis, dinamis, inovatif dengan peningkatan kesejahteraan, pendapatan, pemerintahan

yang bersih, transparan, bertanggung jawab serta terciptanya masyarakat yang sejahtera pada tahun 2022”

- 1) Misi Pembangunan Desa
- 2) Melaksanakan pemerintahan desa secara transparan, bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam.
- 3) Mengoptimalkan kinerja seluruh aparatur desa sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- 4) Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, terampil dalam menggunakan teknologi serta dapat mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- 5) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, keagamaan, kesehatan, ekonomi, pertanian, sosial budaya, serta melibatkan semua unsur yang ada di desa.
- 6) Penanganan kemiskinan dan lapangan pekerjaan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang.
- 7) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 8) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya

perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

- 9) Membangun dan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat desa serta perbaikan tarap hidup masyarakat.
- 10) Menata Pemerintahan Desa Pondok Labu yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 11) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- 12) Menumbuh kembangkan kelompok Tani/Nelayan dan gabungan kelompok Tani/Nelayan dan memfasilitasi kebutuhan Petani/ Nelayan.
- 13) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- 14) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa tekecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan wirasusahawan.
- 15) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

#### **4. Penyajian dan Analisis Data**

- 1. Pengaruh Program Dana Desa dalam hal penyediaan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat.**

Dana Desa merupakan ujung tombak bagi sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada ditingkat desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran agar pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi indikator dari kesejahteraan masyarakat.

**a. Dana Desa**

Pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu merupakan sebuah tindakan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui pertutaran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan kabupaten paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima APBD setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke APBDes melalui RKD.

Tabel 1.3  
Pendapatan Dana Desa

No	Pendapatan Transfer (Rp)	Dana Desa (Rp)	Tahun
1	705.733.636-	265.755.636-	2015
2	1.029.184.400-	599.632.000-	2016
3	1.868.762.000-	777.792.000-	2017
4	1.242.024.892-	687.399.000-	2018
5	1.387.061.533-	774.150.000-	2019

6	1.272.709.207-	778.607.000-	2020
---	----------------	--------------	------

Sumber :LPJ Desa Pondok Labu

Pada keterangan data di atas menunjukkan dana desa yang diterima oleh Desa Pondok Labu yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penggunaan Dana desa yang diterima dialokasikan sebanyak 70% untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal pencairan dana desa dilakukan melalui 2 (Dua) tahapan, yaitu tahapan pertama sebesar 60% dan tahapan kedua sebesar 40% dari pagu dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Radiman, selaku Kepala Desa Pondok Labu mengatakan:

Saya menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2010-2016 untuk satu periode. Saya merasa banyak sekali mengalami rintangan. Rintangan yang saya maksud yaitu dana desa yang tidak memampuni untuk operasional dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, mengingat dana desa yang diterima hanya sebesar Rp. 265.755.636-, sedangkan luas wilayah ± 5.904 Km<sup>2</sup> yang harus dibangun sedangkan jumlah masyarakat 2.057 orang dengan 626 KK. Kebutuhan masyarakat yang begitu banyak dan belum terpenuhi terutama dibidang pemberdayaan masyarakat membuat banyak dari masyarakat yang berasumsi bahwa kami tidak bisa bekerja karena tidak memanfaatkan dana desa yang diterima dari Pemerintah.

Ketika saya menjabat untuk kedua kalinya yaitu dari tahun 2016-2022 dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp. 599.632.000-. Alhamdulillah kami bisa meningkatkan lagi dibidang pembangunan infrastruktur khususnya jalan desa yang menghubungkan dusun 1 (Satu) dan dusun 2 (Dua) sudah mulai ada



perbaikan dan bisa dikatakan layak dilalui menggunakan sepeda motor dan mobil.

Pada tahun lalu, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah Pusat masih disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa yang ada direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan program dan rencana berdasarkan Musrenbang Desa yang tetap difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang dipaparkan oleh Sujiharto, selaku Kepala Urusan Pembangunan berikut:

Program dan kegiatan yang dijalankan di Desa Pondok Labu pada tahun ini masih terfokus pada bidang pembangunan yaitu pembangunan jalan desa dan kolam untuk menampung air bersih, sedangkan untuk kegiatan pada bidang-bidang yang lainnya juga berjalan namun untuk dilihat dari hasilnya dapat dikatakan tidak begitu nampak apalagi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya untuk memprioritaskan pembangunan desa agar tidak tertinggal dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa. Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk membangun desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dan milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD/Kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bahrudiansyah, selaku kepala dusun 2 biyuku mengatakan:

Setahu saya sih, dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya tapi hal ini belum ada transparansi kepada masyarakat berapa jumlah dana yang diterima.

Penggunaan dana desa yang dilakukan aparat desa Pondok Labu belum menerapkan asas dari prinsip penggunaan dana desa yaitu transparansi. Banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengetahui jumlah dana desa yang diterima.

#### **b. Pembangunan Infrastruktur Desa**

Pembangunan infrastruktur di desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga dalam pelaksanaan diperlukan skala prioritas pembangunan dengan tahapan perencanaan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik merupakan salah satu antisipasi agar pembangunan yang ada cukup dilaksanakan sekali dengan perawatan yang berlanjut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur ada yang bersifat dinamis dan memiliki peluang untuk berkembang. Setiap pembangunan infrastruktur memiliki acuan yang perlu dipahami dan secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Penggunaan dana desa yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampak terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Penggunaan dana desa yang sudah direalisasikan berdasarkan data pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Data Pembangunan Infrastruktur Desa Pondok Labu

No	Pembangunan	Lokasi	Dana (RP)
1	Pembatuan Jalan (Batu Gunung) 4 Km	RT. 1 – RT. 5	580.000.000
2	Rabat Beton (Jalan Cor) 600 Meter	Dusun 2 dari RT 4-5	598.255.000
		Dusun 1, RT. 2	598.255.000
		Dusun 2, RT. 3	598.255.000
3	Aspal 600 Meter	Dusun 1, RT. 1	450.000.000
4	Penimbunan jalan setinggi 150 CM Panjang 300 Meter	Dusun 2. RT. 5	222.277.500-
5	Pelebaran Jalan Desa	Dusun 1 – Dusun 2/ RT. 1 – RT. 5	228.743.000

6	Pembatuan Jalan Krokos sepanjang 4 Km	Dusun 1 – Dusun 2/ RT. 1 – RT. 5	281.850.000-
<b>Jumlah</b>			3.557.635.500

*Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur Desa*

Tabel di atas menunjukkan kegiatan yang terealisasikan penggunaan dana desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur guna memberikan kemudahan akses dan perbaikan mutu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang sangat lama mengingat dana desa yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk merealisasikan pembangunan secara merata dan serentak dalam kurun waktu yang singkat. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan akses yang memadai, sehingga mempermudah masyarakat yang melintas untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Pembangunan Infrastruktur sebagai penunjang dari kesejahteraan masyarakat di Desa Pondok Labu sebagai berikut:

1) Pembatuan jalan desa

Proses pembatuan jalan yang dilakukan pemerintah desa pada awalnya dimulai dari penggusuran jalan desa yang bermula hanya jalan setapak sehingga sangat sulit dilalui menggunakan kendaraan baik mobil ataupun sepeda motor.

Penggusuran dilakukan mulai dari RT. 1 sampai dengan RT. 5 mencakupi Dusun 1 (Pondok Labu) dan Dusun 2 (Biyuku).

Penggusuran bertujuan untuk memudahkan proses pembatuan jalan desa, mengingat di Desa Pondok Labu memiliki 3 iklim, tentunya ada kesulitan tersendiri dalam merealisasikan dan membutuhkan waktu 3 bulan lamanya agar jalan desa selesai digusur dan pembatuan secara merata. Jalan desa yang bisa dikatakan 90% tanah liat merupakan salah satu hambatan utama bagi pekerja dalam proses penggusuran ataupun pembatuan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Radiman, selaku Kepala Desa Pondok Labu mengatakan:

Dulu ya, jalan itu sangat sempit dan tidak seperti jalan desa lagi karena tidak ada perbaikan dan perawatan jalan, ketika saya menjabat tahun 2010 itu program pertama kami yaitu penggusuran dan pembatuan jalan, agar mudah diakses oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Yasir Arafat, selaku mantan sekretaris Desa Pondok Labu mengatakan:

Jalan desa yang ada di kampung ini memang sangat memprihatinkan, makanya program utama kami ya, memperbaiki jalan. Adapun biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 580.000.000- seingat saya.

Dari hasil wawancara di atas yang dipaparkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa, jalan yang ada di sudah mulai ada perbaikan ketika menjabat pertama di tahun 2010-2016 yaitu dalam bentuk penggusuran jalan yang sudah rimbun ditutupi rumput dan pembatuan jalan sehingga ketika musim hujan tiba jalan masih bisa dilalu masyarakat menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil.

## 2) Rabat Beton (Jalan Cor)

Jalan desa sudah beberapa kali proses perbaikan belum bisa memuaskan harapan dan keinginan dari masyarakat sebab jalan yang dibangun di desa hanya menggunakan batu putih sehingga tingkat kesulitan masih dirasakan oleh masyarakat pada saat musim hujan tiba.

Tahapan pembangunan jalan desa berdasarkan data yang diperoleh memiliki 4 titik pembangunan yaitu 3 titik rabat beton dan 1 titik aspal jalan. Proses pembangunan jalan pertama dimulai dari rabat beton yang berlokasi di RT. 4 sampai dengan RT. 5 yang bertepatan di Dusun 2 Biyuku dengan biaya sebesar Rp. 598.255.000- untuk pembangunan sepanjang 600 Meter dengan ketebalan 20 cm yang membutuhkan waktu selama 2 bulan lamanya.

Tahapan yang kedua berlokasi di RT. 1 yang berada dititik Dusun 1 Ponok Labu dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 600 Meter yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 450.000.000- dengan ketebalan aspal 10 cm.

Tahapan yang ketiga berlokasi di RT. 3 yang bertepatan di Dusun 2 Biyuku sama halnya dengan di RT. 4 dan RT.5 yaitu penggunaan rabat beton, namun sedikit berbeda dengan sebelumnya sebab rabat beton di RT. 3 menggunakan kawat jarring untuk mengantisipasi keretakan dan kerusakan jalan dengan cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk proses rabat beton sebesar Rp. 598.255.000- sepanjang 600 Meter dengan ketebalan 20 cm yang membutuhkan waktu  $\pm$  3 bulan lamanya

Tahapan proses pembangunan jalan terakhir berada pada titik RT. 2 di Dusun 1 Pondok Labu menggunakan rabat beton biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 598.255.000- sepanjang 600 Meter dengan ketebalan 20 cm.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujiharto, selaku Kaur pembangunan Desa Pondok Labu mengatakan:

Sebenarnya dana desa itu memang 70% untuk pembangunan infrastrukturnya, cuma untuk pembangunan seperti rabat beton dan pengaspalan jalan yang terealisasi ini, bukan dari dana desa melainkan dari pemerintah Kabupaten Kotabaru karena jalan yang ada di desa Pondok Labu sejauh 6 Km itu merupakan jalan Pekerjaan Umum (PU), jadi untuk proses perbaikannya bukan pengalokasian dari dana desa mas.tapi ada pengecoran jalan yang berlokasi di RT.2 menggunakan dana desa

Tanggapan masyarakat Desa Pondok Labu terhadap pembangunan jalan desa dilihat dari kepentingan masyarakat

Kalo kami merasa terbantu sebenarnya dengan adanya jalan desa yang mulai membaik tapi yang kami bingungkan itu perbaikan jalan berupa jalan cor, kenapa tidak merata hanya di depan rumah warga saja sedangkan jalan yang tidak ada rumahnya tidak ada pengecoran jalan itupun, bisa dikatakan parah jalannya, mungkin kamu bisa lihat sendiri, antara RT.3 dan RT.5 itu parahkan, apalagi musim hujan. Bukan disitu aja, coba kamu telusuri jalan antara RT.3 dan RT.2 itu lebih parah lagi. Ketika musim hujan tiba kami mau ke pasar yang ada di RT.1 itu pun ga bisa.

### 3) Pelebaran Jalan Desa

Program pelebaran jalan yang sudah direncanakan sudah terealisasi membutuhkan biaya sebesar Rp. 228.743.000-sepanjang 4 Km jalan desa dari RT.1 sampai dengan RT. 5. Pelebaran dilakukan agar mempermudah masyarakat ketika melintas di jalan desa.

#### 4) Penimbunan Jalan

Desa Pondok Labu bisa dikatakan rawan banjir pada saat musim hujan tiba, sehingga diperlukan perawatan jalan yang signifikan dari pemerintah desa, salah satunya penimbunan jalan yang berada dilokasi RT. 5 yang menghubungkan antara RT.3.Penimbunan ini dilakukan karena sangat menghambat aktivitas masyarakat. Penimbunan yang dilakukan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 222.277.500-,sepanjang 300 Meter dengan ketinggian timbunan 150 cm.

#### 5) Pembatuan Jalan (Batu Krokos)

Pengalokasian dana desa sebagai perbaikan infrastruktur baik fisik maupun non fisik setiap tahun mendapatkan anggaran dari dana desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Proses pembangunan yang ada, sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan dana untuk biaya perawatan. Realisasi pelebaran jalan di Desa Pondok Labu harus diimbangi dengan pembatuan yang seharusnya dilakukan secara merata agar tidak terjadi hambatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dana desa yang dialokasikan sebagai perawatan jalan sebesar Rp. 281.850.00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa pondok labu mengatakan terkait pembangunan yang ada di desa



Sebenarnya saya tidak berani menggunakan dana desa untuk perbaikan jalan desa tapi mau bagaimana lagi, saya melihat jalan sangat parah sedangkan pemerintah Kabupaten Kotabaru ketika ditanya terkait dana untuk perbaikan jalan PU yang ada di desa ini,selalu mengatakan tidak ada uangnya. Bahkan mereka menyerahkan ke desa untuk menggunakan dana desa memperbaiki jalan desa.

Peraturan pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang yang mengatur tentang desa pembangunan infrastruktur diprioritaskan setiap desa baik Infrastrukturu fisik maupun non fisik yang dijadikan pendukung. Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun infrastruktur yang dimaksud sebagai pendukung dan membantu dalam segala aktivitas masyarakat sebagai berikut ini:

Tabel 1.5

Pembangunan Infrastruktur Pendukung

No	Pembangunan	Lokasi	Dana Desa
1	6 Kolam Penampung Air Bersih	RT.1 – RT. 6	Bantuan PT. Minamas
2	Pipanisasi	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 315.278.600-
3	3 Gorong-Gorong Beton	RT.1 – RT. 6	Rp. 231.268.000-

4	Pembangkit	Dusun 1 dan	Bantuan adipura
	ListrikTenaga Surya	Dusun 2 dan	
	(PLTS)	Dusun 3	

*Sumber: LPJ Desa Pondok Labu*

Tabel di atas menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur pendukung di Desa Pondok Labu yang merupakan kebutuhan masyarakat berupa kolam air bersih, pembangunan jembatan dan PLTS sebagai motorik dari kesejahteraan masyarakat desa.

Pembuatan kolam yang dijadikan sebagai penampung air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup. Pada saat musim kemarau masyarakat Pondok Labu sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih, program dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa untuk membuat kolam setiap RT di desa sangat meringankan beban masyarakat untuk memperoleh air bersih. Bantuan berupa pipanisasi agar masyarakat dapat menikmati air bersih di setiap RT sudah terealisasi namun secara operasinya belum bisa maksimal disebabkan masyarakat belum menikmatinya secara merata.

Pembangunan pendukung lain yang berpengaruh dalam aktivitas masyarakat ketika musim hujan yaitu jembatan penghubung jalan. Desa Pondok Labu masih dikatakan rawan banjir, maka dengan adanya pembangunan jembatan dapat membantu untuk mengurangi banjir yang disebabkan sungai kecil yang ada sudah mulai dangkal.

Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya dalam membantu aktivitas masyarakat yaitu adanya listrik. Bantuan adipura dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Pondok Labu sangat membantu masyarakat sebagai penerangan disetiap rumah-rumah warga.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak bisa dilepaskan dari adanya partisipasi masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, sebab secara prinsipnya pembangunan digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam hal tanggung jawab berhasil atau tidaknya pembangunan bukan hanya di tangan pemerintah tetapi masyarakat perlu ikut andil dan penuh akan kesadaran untuk merealisasikan program yang sudah di buat atau perencanaan pembangunan. Kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

**Analisis pelaksanaan penggunaan Dana Desa terhadap infrastruktur di Desa Pondok Labu**

No	Sektor	Sumber Dana	Analisis
1	Jalan -Pembatuan -Rabat Beton -Aspal	Dana Desa & Pekerjaan Umum	Penggunaan dana desa yang diprioritaskan sebesar 70% untuk infrastruktur di Desa Pondok Labu belum sepenuhnya tepat sasaran disebabkan penggunaan dana desa yang

			seharusnya membuat jalan ranting tani dan kebun tidak diterapkan. Dana Desa yang ada di Desa Pondok Labu digunakan untuk memperbaiki jalan Pekerja Umum (PU) yang merupakan tanggung jawab dari Kabupaten Kotabaru.
2	Air Bersih -Kolam Air -Pipanisasi	Dana Desa	Pemerintah Desa setiap tahun memberikan anggaran untuk kepentingan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih sehingga disediakan kolam sebagai penampung air bersih serta pipanisasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih. Dana Desa yang setiap tahun di anggarkan belum bisa

			<p>teralisasi dengan baik dilapangan yang pembuatan kolam penampung air bersih masih berupa bantuan dari perusahaan PT. Minamas. Dana Desa yang dikatakan sebagai perbaikan pipanisasi tidak terealisasi terbukti masyarakat masih mengambil air bersih secara manual ke kolam atau sumur.</p>
3	Listrik -PLTS	Bantuan Adipura	<p>Desa Pondok Labu memperoleh bantuan dari Adipura dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai pendukung aktivitas masyarakat desa.</p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya desa dan masyarakat penggunaan dana desa tidak tepat sasaran disebabkan didalam Undang-undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memprioritaskan dana desa sebesar 70% digunakan sebagai infrastruktur desa. Dana Desa yang terealisasi di Desa Pondok Labu berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk perbaikan jalan Pekerja Umum bukan jalan ranting tani atau kebun masyarakat. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 4 tahun 2017 tentang pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Kotabaru pasal 12 menerangkan prioritas penggunaan dana desa sebagai pembangunan infrastruktur yang merupakan tanggungjawab dari desa bukan mengambil alih dari tanggungjawab Kotabaru.

### **c. Kesejahteraan Masyarakat**

Pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan seluruh warganya, namun bila dilihat dari fungsinya pemerintah desa tidak sepenuhnya bertanggungjawab akan hal kehidupan masyarakat baik secara individu, keluarga, komunitas maupun lembaga masyarakat sebab pemerintah desa juga memiliki lingkup tanggungjawab sendiri. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat yang dicirikan dengan 3 (tiga) hal yaitu

1. Mampu memenuhi kehidupan dasarnya mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai individu baik sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan.
2. Mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan baik secara mandiri maupun bantuan lembaga sosial dan pemerintah desa.

3. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang untuk berkembang dan berhasil sesuai potensi dan kemampuan diri.

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di desa sangat berbeda dengan kehidupan di kota. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu tolak ukur penghambat proses dari aktivitas masyarakat yang mata pencahariannya masih bergantung pada perkebunan dan pertanian. Infrastruktur yang baik terutama jalan di desa merupakan hal yang utama diprioritaskan agar lebih mudah untuk menjangkau segala aktivitas masyarakat diberbagai aspek kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Berdasarkan indikator utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pondok Labu sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Kesejahteraan merupakan impian setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Tolak ukur yang dapat dikatakan masyarakat sejahtera yaitu dilihat dari kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kekuatan yang dimaksud tidak lepas dari pendapatan masyarakat yang selalu berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja harus dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sangat diperlukan agar masyarakat memiliki penghasilan dan mampu memutar roda perekonomian sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima. Kondisi ekonomi masyarakat sendiri yang ada di Desa Pondok Labu dapat dilihat dari tingkat pendapatan.

Berdasarkan tingkat pendapatan bruto masyarakat Desa Pondok Labu per kepala keluarga yang mayoritas mata pencaharian berkebun dan petani masih tergolong pendapatan yang sangat minim berkisar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- perbulan, sedangkan kebutuhan hidup masyarakat dalam perkepala keluarga minimal Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-perbulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan:

Saya rasa untuk masyarakat di desa ini bila dilihat dari segi pekerjaan masih tergolong sangat lemah ya, apalagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penghasilannya sedikit.

Masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani dan berkebun seharusnya ada pemberdayaan dari masyarakat desa seperti penyediaan pupuk, bibit dan sebagainya. Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

Mana ada penyediaan seperti pupuk ataupun bibit di desa ini mas, dulu pernah sih bantuan bibit pohon gaharu tapi buat apa juga. Masyarakat yg berkebun seperti karet dan kelapa sawit dan petani yg menanam padi di kasihnya ko macama-macam hahah



Kebutuhan masyarakat Desa Pondok Labu sangat bervariasi namun perlu diperhatikan meskipun masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda pemerintah desa seharusnya mampu memilah mana yang menjadi kebutuhan masyarakat yang memiliki prospeknya berkebun dan bertani.

## 2) Pendidikan yang semakin Mudah dijangkau

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi setiap seseorang untuk menjalin kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang diharapkan mampu membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat desa. Mengingat akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia, maka pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas baik mengenai sarana dan prasarana pendidikan ataupun kualitas sistem pendidikan.

Salah satu aspek dasar agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pendidikan yaitu ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Bila dilihat dari keberadaan sekolah yang ada di Desa Pondok Labu sudah memiliki 1 Taman Kanak-kanak dan 2 Sekolah Dasar yaitu Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Pondok Labu Estate (TK Tunas

Bangsa PLE), Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Labu (SDN 1 Pondok Labu) dan Sekolah Dasar Swasta Paripurna Swakarsa II Pondok Labu Estate (SDS PSA II PLE). Berdasarkan hasil informan dari bapak Amir yang berprofesi sebagai guru SDN 1 Pondok Labu mengatakan.

Kalo saya perhatikan anak-anak disini rata sekolah sih karena masih mudah dijangkau khususnya di SDN 1 Pondok Labu Ini ya. Kualitas pendidikan sudah seharusnya ditingkatkan, semua lapisan masyarakat dituntut agar dapat mengenyam pendidikan khususnya anak-anak yang merupakan penerus dan harapan bagi desa Pondok Labu khususnya serta untuk Negara Indonesia pada umumnya. Sejalan dengan pernyataan di atas tanggapan masyarakat desa terkait dengan pendidikan yang ada di Desa Pondok Labu mengatakan:

Anak-anak di desa ini memang banyak sekolah sih tapi ada juga yang sebagian putus sekolah, faktor ekonomi katanya.

Tanggapan masyarakat di dusun 3 (tiga) bapak Suryadi terkait pendidikan yang ada mengatakan:

Ya kalo anak-anak sekolah banyak tapi saya pribadi kesian juga seperti SDN 1 Pondok Labu itu, muridnya hanya dari dusun 1 aja sedangkan dari dusun lain itu sekolahnya ke swasta. Kalo saya lihat faktornya kalo dari dusun lain itu jalannya tidak mendukung sih, kalo musim hujan sepeda ontel aja bisa-bisa ga tembus.

Tingkat pendidikan di Desa Pondok Labu sudah mulai meningkat dari tahun ketahun, namun masyarakat tidak memprioritaskan Sekolah Dasar di

desanya melainkan memilih di swasta mengingat fasilitas di SDN 1 tidak mendukung seperti di sekolah swasta. Seharusnya SDN 1 Pondok Labu memiliki daya saing tinggi agar anak-anak lebih memprioritaskan. Hal ini perlu ada dukungan dari pemerintah desa agar pembangunan infrastruktur lebih ditingkatkan.

### 3) Kualitas Kesehatan yang meningkat dan merata

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu desa. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu desa yang semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian merupakan tingkat produktivitas penduduk suatu desa dapat diwujudkan. Pembangunan kesehatan dilingkupi masyarakat Desa Pondok Labu sudah seharusnya ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses dalam menjangkau tempat pelayanan publik, seperti Klinik yang disediakan oleh Swasta PLE (PT.Minamas) dan Posyandu yang ada di Desa Pondok Labu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Radiman, selaku kepala desa Pondok Labu mengatakan:

Untuk tempat berobat di desa kita ini memang sedikit sulit karena bidannya tidak tinggal di desa kita.

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada

perekonomian masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan penyampaian Jadh, selaku Sekretaris desa mengatakan:

Jangkauan masyarakat untuk berobat tidak terlalu jauh dan jalannya pun mendukung, namun yang menjadi masalah itu fasilitasnya tidak mendukung mas, masih mending ya di klinik swasta masih ada mentri yang menetap tapi kalo di desa kita bidannya aja tinggal di desa tetangga.

Keadaan masyarakat desa yang tidak mudah untuk menjangkau untuk berobat, membuat masyarakat tidak mahu berkomentar lagi terhadap keadaan desa. Meskipun pihak swasta menyediakan klinik untuk berobat tapi masyarakat tetap resah karena masih dipungut biaya. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Suryadi, selaku kepala dusun 2 (dua) mengatakan:

Setahu saya ya, dari dulu ini terus dipermasalahkan, bahkan ada warga yang meninggal pada saat melahirkan karena lambat di tolong, dari pihak swasta yang menyediakan mentripun terkadang tidak mau datang ketika di ambil, apalagi bidan desa yang posisinya bukan di desa.

Indikator penghambat dari kesejahteraan masyarakat begitu transforan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya cukup mempengaruhi segala aspek dari kehidupan mulai dari pendapatan dan pendidikan. Sebagaimana di sampaikan oleh tokoh masyarakat mengatakan:

Bila masyarakat sehat tentunya pendapatan bisa meningkat, anak-anak dan guru yg mengajarpun lancar. Ya masih mending lah

yang masih kerja di perusahaan tapi masyarakat yang petani tentu sangat kesulitan bukan

Masyarakat Desa Pondok labu berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih diambang kesulitan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat mengingat desa belum bisa memfasilitasi tempat berobat yang memadai. Masyarakat ketika berobat lebih condong kedesa tetangga untuk berobat dengan biaya lumayan mahal minimal Rp.50.000,- hingga Rp. 150.000,-. Pemerintah desa belum bisa maksimal dalam mengutamakan kepentingan dari masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

Hasil analisis terhadap indikator kesejahteraan masyarakat

No	Indikator	Analisis	Kesejahteraan Masyarakat
1	Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Desa Pondok Labu dalam bentuk usahanya belum memadai disebabkan banyak kendala baik dari jalan tani dan kebun yang tidak mendukung serta bantuan dari pemerintah desa tidak ada baik berupa pupuk	Tidak Merata

		ataupun bibit	
2	Kesehatan	Pemerintah desa belum mampu memfasilitasi tempat berobat di Desa Pondok Labu sehingga masyarakat berobat keluar desa.	Tidak Merata
3	Pendidikan	Pendidikan di Desa Pondok Labu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya anak-anak SD meskipun masih SDS lebih diprioritaskan dibanding SDN	Merata

Sumber : Analisis Data Primer

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa indikator dari kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan keingan dari masyarakat dapat dilihat bahwa kebutuhan masyarakat banyak tidak terpenuhi khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan berkebun seharusnya dari pemerintah desa mampu memberikan bantuan baik melalui BUMDes atau melalui dana desa yang dialokasikan sebesar 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan pendidikan di desa Pondok Labu swasta lebih diprioritaskan oleh masyarakat disebabkan sarana memungkinkan dibanding Negeri khususnya Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Hasil wawancara berikutnya yaitu terkait dengan indikator kesejahteraan masyarakat mengenai kesehatan. Kesehatan yang dimaksud yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Desa Pondok Labu. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah desa agar masyarakat lebih mudah untuk menjangkau, namun keadaannya, masyarakat lebih mengutamakan berobat ke desa lain yang memiliki pelayanan memadai. Secara realitas kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mampu bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan serta interaksi sosial terus aktif.

## **2. Faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru**

Dana Desa merupakan sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil dana perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Dana Khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun yang menjadi faktor terkendalanya pembangunan infrastruktur desa yaitu:

### **a. Sumber Daya Masyarakat(SDM)**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama yang sangat penting dalam proses pengelolaan program dana desa. potensi yang dimiliki sumber daya manusia sangat berperan penting dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat melalui pemanfaatan fisik serta daya fikir sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan secara terpadu dan optimal.

Suatu desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompetitif sebagai pendukung agar desa bisa lebih maju. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan kegiatan dan pelatihan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang produktif, kreatif dan inovatif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pengembangan sumber daya manusia selain dalam bentuk kegiatan dan pelatihan diperlukan pendidikan yang memadai dan merata, sehingga masyarakat yang ada di desa mampu menyaring dan membantu aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan program dana desa yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan



kehidupan masyarakat. Bila dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Pondok Labu masih tergolong sangat rendah khususnya aparatur desa.

Tabel 1.6

Pendidikan terakhir aparat Desa Pondok Labu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Radiman	Kepala Desa	SLTP
2	Jadiah	Sekretaris Desa	SMA
3	Yudiansyah	Kaur Program	SMA
4	M. Ade I.	Kaur Keuangan	SMA
5	Rusiansyah	Kaur Umum	SMA
6	Hedi	Kasi Pemerintahan	SMK
7	Sujiharto	Kasi Pembangunan	SLTP
8	Remiyanti	Kasi Kesejahteraan	SMA

Sumber : Sekretaris Desa Pondok Labu 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan minimnya pendidikan aparatur pemerintah di Desa Pondok Labu, rata-rata berpendidikan SMA/SMK, rendahnya tingkat pendidikan aparat desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan program dana desa. Keterbatasan pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan desa menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat proses perencanaan untuk membangun dan

menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia, sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu tentu harus melalui komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non verbal yang mudah dipahami oleh pendengar. Dengan adanya komunikasi yang baik, interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan harmonis, sehingga pesan, ide ataupun gagasan mudah tersampaikan. Berdasarkan realitas yang ada di Desa Pondok Labu, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengelolaan program dana desa dibidang infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Radiman, selaku kepala desa mengatakan:

Tokoh masyarakat saya rasa ketika diadakanya MusrenbangDesa, kami undang semua tu, mulai dari RT, RW, Kadus,dan aparaturnya desa dalam menentukan program yang ingin dijalankan. Namun ketika dilaksanakan Musrenbang Desa ada yang tidak hadir dan yang hadirpun ketika dalam forum tidak aktif juga.

Dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan komunikasi yang baik dengan masyarakat tujuannya agar perencanaan dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah desa, begitupun sebaliknya masyarakat harus

menyampaikan aspirasi melalui musyawarah apabila terjadi ketidak seimbangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tanggapan salah satu dari aparat desa Bapak Dudin, selaku Kepala Dusun 2 Biyuku mengatakan:

Kalo saya pribadi ya mungkin memang sedikit apatis terkait dengan penyusunan perencanaan pada Musrenbang Desa sekrang ini. sebab beberapa kali saya hadir dan saya pun menyampaikan ide atau gagasan saya untuk kemajuan desa pada forum hanya sebatas didengar saja.

Sejalan dengan pendapat di atas, pernyataan dari Bapak Jaim,selaku Ketua RT. 5 mengatakan hal yang serupa bahwa:

Aku tidak paham dengan pemerintahan desa sekarang ini, seakan-akan masyarakat selalu dianggap salah. Sama halnya ketika ada musyawarah desa, banyak yang memberikan idenya tapi yaitu hanya untuk menutup kesunyian dalam forum aja, pembuktian ketika dilapangan itu tidak ada. Yang saya bingungkan lagi ketika diadakanya pembangunan tidak ada komunikasi dengan kami khususnya masalah dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam memberikan ide ataupun gagasan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan programnya, namun yang menjadi kendala antara pemerintah dengan masyarakat yaitu komunikasi tidak terjalin dengan baik. Hal itu sejalan dengan pendapat masyarakat mengatakan:

Bagaimana kami mau ikut andil secara penuh ketika ada musyawarah desa atau kegiatan dalam bentuk gotong-royong dan segala macam. Sebab kami hari-hari aja tidak ada menjalin komunikasi dengan aparatur desa khususnya

Kades dan Sekdes. Mereka condong menunggu masyarakat mendatangi sedangkan mereka tidak berbaur dengan kami atau mendatangi kami untuk berguyon atau diskusi.